

# DINAMIKA KONFLIK ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DALAM ERA DEMOKRATISASI DI YOGYAKARTA

Surwandono

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
Email: wsurwandono@yahoo.com

**Abstrak-** Artikel ini menjelaskan tentang interaksi antar organisasi keagamaan berbasis Islam dalam era demokratisasi, yang memungkinkan terjadinya kontestasi dalam bentuk perdebatan pemikiran keagamaan secara terbuka, maupun kontestasi dalam memperebutkan akses ekonomi, social, politik dan budaya dalam masyarakat. Studi penelitian dari artikel ini dilakukan di Yogyakarta, yang selama ini telah terkonstruksi sebagai kota pendidikan, budaya dan kota toleransi. Untuk mendapatkan obyektifikasi dalam melihat relasi demokratisasi dengan timbulnya konflik di antara organisasi keagamaan berbasis Islam, dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 23 tokoh kunci organisasi keagamaan berbasis Islam, dan survey di 27 kecamatan di Yogyakarta. Artikel ini mempergunakan analisis SAT (structural, akselerator dan trigger), untuk membaca peta konflik antar organisasi keagamaan berbasis Islam. Konflik antara organisasi keagamaan berbasis Islam di daerah agraris cenderung disebabkan oleh khilafiah dalam mempraktikkan ajaran Islam dalam lapangan peribadahan, sedangkan konflik di daerah urban lebih disebabkan

**Kata Kunci:** Organisasi Keagamaan Islam, Konflik, Demokratisasi oleh perebutan akses politik, social dan ekonomi.

## A. PENDAHULUAN

Konflik horizontal berbasikan issue keagamaan telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena kekerasan atas nama agama sedemikian rupa telah mengejala di banyak daerah, bahkan secara eksplosif muncul di beberapa Negara Timur Tengah akhir-akhir ini. Dalam pembahasan majalah Suara Muhammadiyah Edisi September 2013, konflik horiosntal terkait dengan issue agama difahami sebagai salah satu ancaman paling serius dalam konteks harmoni sosial, dibandingkan dengan konflik horizontal lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa agama sejatinya mengajarkan tata harmoni masyarakat, perdamaian, cinta kasih namun dalam manifestasinya konflik sosial berbasis agama lebih sering hadir dalam wajah kekerasan. Bahkan lebih dari itu, konflik horizontal berbasis agama seringkali melibatkan pilar-pilar penjaga moral masyarakat, seperti tokoh agama dan institusi peribadatan, yang seharusnya para pemuka agama dan institusi keagamaan menjadi pilar dari harmoni sosial itu sendiri.

Issue konflik horizontal berbasis agama di Indonesia, mengalami dinamika yang sangat berarti, dari konflik horizontal lintas kelompok agama, seperti kasus di Poso, Ambon, sampai dengan issue konflik horizontal dalam satu kelompok agama, semisal dalam masyarakat Islam seperti kasus Ahmadiyah, Syiah, Wahabi, kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modernis. Konflik horizontal tersebut sampai dalam titik yang cukup mengkhawatirkan, di mana klaim-klaim kebenaran sefihak sampai menempatkan fihak lain sebagai kafir, halal darahnya.

Konflik horizontal dalam kelompok keagamaan Islam, juga mulai berkembang dan menunjukkan kutub ketegangan yang mulai menguat. Terdapat kecenderungan terjadinya pengkategorisasian gerakan keagamaan Islam di Indonesia, yakni indigenous Islam Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, dan Islam Transasional seperti Salafi, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Tarbiyah/Ilkhwani Muslimin, atau mengutanya gerakan baru Islam di Indonesia yang juga unik seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Ahmadiyah Indonesia, Front Pembela Islam, Majelis Tafsir Al-Quran. Pengkategorisasian ini dalam konteks tertentu menimbulkan berbagai masalah, seperti menibulkan stigma bahwa Islam indogeneous Islam Indonesia sebagai islam yang cair, moderat, sedangkan Islam transnasional sebagai fenomena Islam yang militant, kaku, dan konservatif, atau gerakan baru Islam yang juga memunculkan issue konflik keagamaan yang baru.

Dua organisasi besar Islam indigenous Indonesia, seperti Muhammadiyah dan NU, mengalami iritasi hubungan dengan Islam transasional, terkait dengan adanya dugaan infiltrasi pemikiran Islam Transasional ke dalam struktur organisasi dan amal usaha Muhammadiyah maupun NU. Iritasi hubungan ini melahirkan pilihan kebijakan organisasional dari Muhammadiyah dan NU untuk menjaga jarak hubungan untuk mengurangi benturan-benturan lebih jauh melalui pembuatan Surat Keputusan Organisasi untuk memproteksi dari kemungkinan infiltrasi pemikiran baru.

Iritasi hubungan di tingkat organisasi, dalam batas tertentu dapat dikelola dengan mengeluarkan kebijakan legal formal untuk saling menghormati dan tidak saling menginfiltrasi pemikiran. Namun di tingkat akar rumput, benturan-benturan seringkali muncul dan ada kecenderungan frekuensi benturan semakin tinggi. Misal dengan pelarangan aktivitas kelompok organisasi tertentu untuk menggunakan sarana ibadah (masjid) yang diklaim

sebagai wilayah binaan organisasi Islam tertentu. Kondisi ini kemudian menyebabkan reaksi negative dari kelompok organisasi keagamaan yang dilarang.

Bahkan dalam batas tertentu, mulai ada kecenderungan bahwa dua organisasi besar Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU mulai ada sedikit ketegangan terkait dengan issue de-radikalisasi, yang juga sering dimaknai dengan De-Wahabisasi. NU sangat aktif terlibat dalam program de-radikalisasi faham keagamaan Islam, untuk mengembalikan Islam sebagai agama yang moderat. Namun seringkali terdapat stigma yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab, bahwa Muhammadiyah sering ditempatkan secara sefihak sebagai organisasi yang memiliki keterdekatan dengan aliran Wahabi. Sehingga de-radikalisasi faham keagamaan dinilai sebagai upaya de-Muhammadiyahisasi. Kondisi inilah yang kemudian berupaya diproporsionalkan oleh Muhammadiyah, agar program de-radikalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak menyudutkan faham keberagaman Muhammadiyah dan tidak menghadap-hadapkan antara Muhammadiyah dan NU secara diametral.

Studi tentang konflik antar kelompok dalam Islam sesungguhnya merupakan studi yang sangat tua. Muhammad Abu Zahrah telah menulis sebuah buku *Aliran Potik dan Aqidah Dalam Islam*, memaparkan secara jelas tentang fenomena konflik antara Sunni, Syiah dan Khawarij yang menahun, bahkan sampai saat ini masih terasa. Dalam studi tersebut, Muhammad Abu Zahrah mengajukan tesis bahwa konflik yang terjadi pasca Rasulullah Muhammad SAW wafat, berakar dari persoalan Muamallah yakni terkait dengan siapa yang seharusnya menjadi pemimpin pasca Rasul Muhammad SAW. Namun karena penyelesaian politik tidak terlembagakan dengan baik, maka terjadilah akumulasi kekecewaan di masing-masing kelompok yang kemudian mengkristal menjadi ideologi baru. Inilah yang kemudian difahami sebagai perubahan konflik dari *konflik muamallah* (hubungan antar manusia) yang seringkali sifatnya relative dan terbuka menjadi *konflik aqidah* (hubungan dengan Tuhan) yang bersifat absolut, eksklusif dan prinsipal.<sup>1</sup>

Sampai saat ini, konflik Sunni Syiah lebih menunjukan sebagai konflik ideologis, yang seringkali menihilkan satu sama lain. Bagi kalangan kelompok Syiah yang ekstrim, siapapun yang tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai Imam atau pemimpin, maka kelompok tersebut difahami sebagai kelompok jahiliyyah dan sesat. Demikian pula bagi kalangan Sunni, juga menempatkan Syiah sebagai kelompok yang sesat karena telah menempatkan posisi Ali bin Abi Thalib dan perkataan-perkataan dalam tempat yang sangat mulia. Representasi konflik Sunni dan Syiah secara ketat, dan saling menihilkan satu sama lain terepresentasikan dalam hubungan yang kaku antara Arab Saudi, yang mengklaim sebagai pewaris utama Sunni, dan Iran sebagai pewaris utama Syiah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta, LOGOS, 2006

<sup>2</sup> Lihat dalam Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta, LPPI UMY, 2006

Studi tentang penyebab konflik antar organisasi keagamaan sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti Indonesia. Tesis Abdul Munir Mul Khan lebih bertutur bagaimana konflik yang terjadi antar masyarakat yang berafiliasi kepada organisasi keagamaan tertentu kemudian memilih afiliasi kultural bersama dalam bentuk kompromistik.<sup>3</sup> Studi M Nur Hasan memberikan catatan penting tentang kompetisi aliran keagamaan tradisional, yang seringkali terlembagakan dalam struktur organisasi NU<sup>4</sup>, dan aliran keagamaan modernis, yang terlembagakan dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Dua organisasi Islam yang menjadi mainstream aliran keagamaan di Indonesia menunjukan dinamika hubungan yang sangat intensif, dari fase yang saling kompetisi ide, saling melakukan pendekatan satu sama lain, sampai dengan pilihan untuk menghargai satu sama lain. Pada tingkat hubungan yang diametral, hubungan NU dan Muhammadiyah tidak harmonis terkait dengan interpretasi issue pokok Islam dalam hal peribadahan. Pada tingkat hubungan yang harmonis, terkait dengan posisi NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi sipil yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga moral dan harmoni masyarakat Indonesia.

Studi tentang penyebab konflik konflik organisasi Islam yang berbasis transnasional dilakukan oleh Ali Jabir. Dalam studi masternya, Ali Jabir melakukan studi secara mendalam tentang basis teologi dan dakwah dari organisasi *Jamaah Tabligh*, *Hizbut Tahrir*, *Salafi*, maupun *Ikhwanul Muslimin*, dan *Ashar Muhammadiyah*. Konflik antar organisasi ini sedemikian rupa sangat kuat, bukannya hanya dalam dataran metode dakwah namun juga dalam basis pemaknaan terhadap beberapa asas Islam.<sup>5</sup>

Interaksi antar *harakah* (gerakan) Islam di banyak negara di Timur Tengah dalam mendiskusikan konsepsi dan praktikal Islam menghadirkan konflik yang tidak elok, di mana terdapat kecenderungan besar timbulnya tradisi saling mengkafirkan (*tafkiriyyah*), bahkan kemudian saling menghalalkan darahnya sudah menjadi fenomena yang sangat mengerikan. Kondisi ini telah menarik perhatian Yusuf Qardhawi, untuk menyusun sebuah pemaknaan baru dalam memaknai perbedaan. Pemaknaan yang benar dan shahih terhadap perbedaan akan semakin mencerdaskan umat Islam dan terhindar dari politik pecah belah yang justru merugikan Islam serta bertentangan dengan nalar Islam itu sendiri. Yusuf Qardhawy yang memperkenalkan konsepsi memaknai perbedaan dalam dinamika masyarakat dengan istilah *fiqh ikhtilaf*.

Qardhawy membuat klasifikasi perbedaan pemikiran keagamaan Islam dalam dua kategori besar; **Pertama**, perbedaan yang disebabkan karena akhlaq.

<sup>3</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta, Bina Aksara, 2000

<sup>4</sup> M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU: Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU Dalam Upaya Pemberdayaan "Civil Society"*, Yogyakarta, Manhaj, 2009

<sup>5</sup> Hussein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003

Perbedaan karena faktor akhlaq, diposisikan sebagai bentuk perbedaan yang merusak dimana seringkali dilandasi oleh sifat membangga-kan diri, buruk sangka pada fihak lain, egoisme dan menuruti hawa nafsu, fanatik kepada golongan atau mazhab, fanatik kepada negeri, daerah, partai, jama'ah atau pemimpin.<sup>6</sup> Perbedaan seperti ini hendaknya yang harus dijauhi oleh organisasi keagamaan berbasis Islam, karena karakter konfliknya menjadi hitam putih, saling mengkafirkan, bahkan saling menghalalkan darah.

Kedua, perbedaan yang disebabkan karena faktor pemikiran. Sedangkan perbedaan disebabkan faktor pemikiran merupakan sebuah kemestian di dalam Islam. Dalam pandangan Qardhawy, perbedaan karena masalah pemikiran bisa dimengerti dan bisa diterima karena sebab-sebab berikut: **Pertama**, Tabiat Agama Islam, hal ini disebabkan oleh karakter hukum Islam yang mempunyai sifat *manshuh 'alaih* (ditegaskan dengan eksplisit) dan ada pula yang *maskut'anhu* (ditegaskan dengan implisit). Juga diketemukan hukum atau ayat yang *muhkamat* (jelas, terperinci) ataupun yang *mutasyabihat* (tersembunyi, dan perlu ta'wil lebih jauh). Ada juga yang mempunyai sifat *qath'iyyah* (pasti) atau *dhanniyat* (belum pasti), ada yang *sharih* (jelas) ada juga yang *mu'awwal* (memungkinkan penafsiran). Misal dalam konteks pemikiran politik tentang posisi syariah dalam negara, terdapat kelompok yang menyatakan wajib penerapan syariah secara formal, sedangkan kelompok yang lain menempatkan posisi syariah hanya sebatas optional.<sup>7</sup>

**Kedua**, Tabiat Bahasa (Arab), bahasa utama yang digunakan dalam sumber kebenaran Islam adalah bahasa Arab. Dalam studi bahasa Arab, terutama dalam perbincangan dalam lafadh, ada kecenderungan lafadh yang mempunyai banyak arti (*musytarak*) dan ada yang memiliki makna majas (*kiasan*). Ada juga lafadh yang mempunyai sifat *khash* (khusus) adapula yang mempunyai sifat *'aam*. Ada lafadh yang mempunyai sifat *rajih* (kuat) ada yang kurang kuat (*marjuhah*).

Sangat bervariasinya makna sebuah lafadh dalam bahasa Arab, menyebabkan seseorang dalam memahami sebuah ayat ataupun hadits seringkali berbeda, karena yang satu menggunakan makna dasar sedangkan yang lainnya menggunakan makna kias. Semisal dalam konteks sejarah Islam, terdapat perbedaan yang signifikan dalam perkara kedudukan perempuan sebagai pemimpin politik, sebagian besar Imam memahami hadits tentang kepemimpinan dalam politik dalam konteks keumuman lafadz, sehingga fatwa tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih konservatif. Sedangkan dalam pandangan Imam Abbas, memberikan ruang terbuka untuk memahami hadits dengan menggunakan kekhususan sebab, sehingga fatwa tentang kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih terbuka.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Lihat dalam Yusuf Qardhawy, *Fiqihul Ikhtilaf* (Terjemahan), Jakarta, Gema Insani Press, 2005

<sup>7</sup> Lihat lebih jauh dalam Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1997

<sup>8</sup> Lihat dalam Yusuf Qardhawy, *Berpolitik Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003

**Ketiga**, Tabiat Manusia, dalam men-sikapi hukum Islam yang plural, kebanyakan manusia menuruti kecenderungan yang selaras dengan kondisi yang melekat dengan dirinya, maupun pengalaman terstruktur yang selama ini membentuk pola pikir seseorang. Perbedaan sifat-sifat manusia dan kecenderungan psikologisnya ini akan mengakibatkan perbedaan mereka dalam menilai sesuatu, baik dalam sikap dan perbuatan. Perbedaan karena masalah tabiat manusia adalah sesuatu yang niscaya, sehingga dalam contoh sejarah Islam, ada kecenderungan terdapat perbedaan artikulasi Islam dalam 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib. Rasulullah membiarkan perbedaan artikulasi Islam, dan difahami sebagai sesuatu yang alamiah, sepanjang tidak keluar dari nilai dasar Islam.<sup>9</sup>

**Keempat**, Tabiat Alam dan kehidupan, tabiat alam yang ditempati manusia mempunyai corak topografi, geografi, iklim dan cuaca yang berbeda. Perbedaan lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemikiran seseorang, semisal orang yang tinggal di gurun pasir mungkin akan berbeda dengan orang yang tinggal di desa yang subur. Mazhab fiqh seringkali berbeda tidak bisa dilepaskan dari kondisi alam sekitar yang memang menghendaki pemikiran lebih lanjut (kontekstual). Semisal, Imam Syafi'i membuat fatwa yang berbeda karena perbedaan wilayah atau geografis, dalam kitab *qaul qadim wa qaul jaddid*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang penyusunan indeks dan peta konflik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data riil dari dinamika konflik yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan kuantitatif, akan dilakukan pengukuran fenomena konflik dengan didasarkan oleh beberapa indikator penting yang meliputi: Pertama, Intensitas konflik, yakni berapa kali kejadian konflik timbul dalam kurun waktu satu tahun. Kedua, Jumlah orang atau fihak (*parties*), yakni berapa banyak orang yang terlibat dalam konflik. Ketiga, Penggunaan instrumen kekerasan dalam konflik, yakni instrumen kekerasan apa saja yang dipergunakan, dari kekerasan psikis/verbal sampai kekerasan fisik. Keempat, Jumlah korban, yakni berapa banyak yang menjadi korban, baik dari korban luka sampai meninggal dunia. Kelima, Dampak konflik, yakni dampak apa saja yang ditimbulkan dari konflik tersebut, seperti dampak social, ekonomi, politik, budaya.

Data penelitian penyusunan indeks dan peta konflik diperoleh melalui survai terhadap stakeholder konflik di Propinsi Daerah Istimewa. Survai akan dilakukan terhadap seluruh kecamatan yang berada di DIY yang berjumlah 78 kecamatan, yang meliputi 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, 18 kecamatan di kabupaten Gunung Kidul, 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman, 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, dan 14

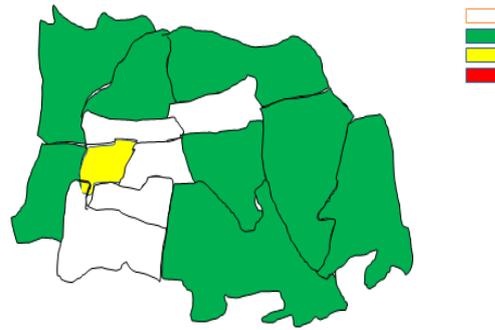
<sup>9</sup> Lihat dalam Muhammad Ramadhan al Buty, *Sirah Nabawiyah* Jilid I, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

kecamatan di kota Yogyakarta. Survei akan dilakukan melalui penyebaran kuisioner secara fisik, dengan langsung melakukan wawancara dengan 78 birokrasi di lingkungan Kantos Urusan Agama (KUA) di 78 kecamatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mendapatkan kedalaman makna dari peta konflik tersebut, dilakukan wawancara dengan tokoh organisasi keagamaan yang berjumlah 23 orang yang berasal dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir, Salafi, Jamaah Tabligh, Ahmadiyah, LDII, Tarbiyah, Majelis Mujahidin Indonesia, Majelis Tafsir Al Quran dan MUI.

### III. PEMBAHASAN

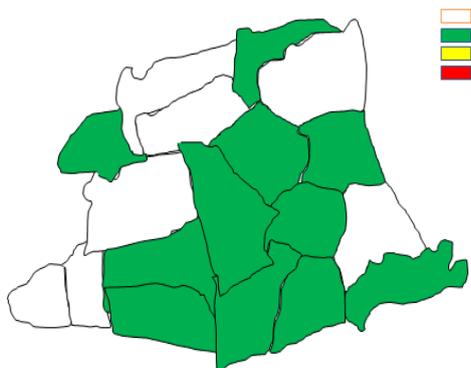
Survei yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana UMY bersama dengan LPDP menghasilkan sejumlah temuan yang menarik terkait dengan dinamika konflik organisasi keagamaan berbasis Islam di propinsi DIY. Secara rata-rata, indeks konflik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi angka sebesar 1.28, yang bermakna konflik sudah muncul/manifest dalam masyarakat namun masih dalam skala terbatas dan kurang intensif, yang kemudian disebut dengan derajat konflik rendah. Yang kemudian tercermin dalam gambar (Putih: Rendah, Hijau: Sedang, Kuning: Agak Tinggi, Merah: Tinggi) dan tabel berikut;



Dari gambar ini tercermin ada sekitar 7 kecamatan di Gunung Kidul yang memiliki indeks konflik 1, yang bermakna derajat konflik sangat rendah atau tidak ada. Dan terdapat sekitar 11 kecamatan yang indeks konfliknya antara 1.1 sampai 2.0. Sedangkan indeks konflik di kota Jogjakarta terdapat 5 kecamatan dengan indeks konflik 1, yang bermakna derajat konflik rendah atau tidak ada konflik, dan 7 kecamatan dengan indeks konflik antara 1.1 sampai 2, yang bermakna konflik sedang, dan ada satu kecamatan yakni Ngampilan yang angka indeks konfliknya di atas 3, yang bermakna konflik sudah cukup tinggi.

Gambar 1

Peta Indeks Konflik Organisasi Keagamaan Berbasis Islam di Kabupaten Gunung Kidul

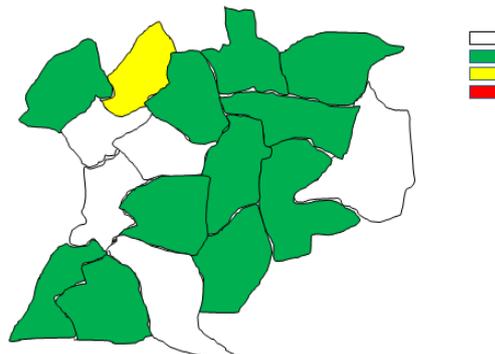


Gambar 2

Peta Indeks Konflik Organisasi Keagamaan Berbasis Islam di Kabupaten Bantul

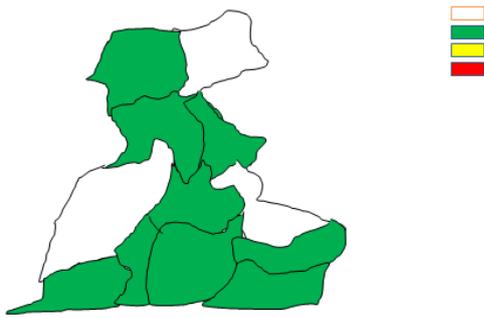
Gambar 3

Peta Indeks Konflik Organisasi Keagamaan Berbasis Islam di Kota Jogjakarta

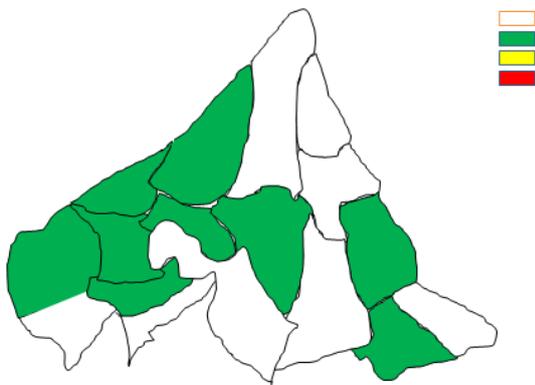


Gambar 4

Peta Indeks Konflik Organisasi Keagamaan Berbasis Islam di Kabupaten Kulon Progo



Gambar 5  
Peta Indeks Konflik Organisasi Keagamaan Berbasis Islam di Kabupaten Sleman



Indeks konflik di kabupaten Kulon Progo terbagi ke dalam 2 kategori, yakni indeks konflik yang rendah yang terwakili oleh 6 kecamatan yang diwarnai dengan warna biru muda, dan 6 kecamatan yang diwarnai dengan biru tua yang bermakna indeks konflik sedang. Sedangkan di Bantul, ada satu kecamatan dengan indeks konflik sedang ke tinggi, dan lima dalam konteks sedang, dan 11 dalam indeks rendah. Indeks konflik di kabupaten Sleman berimbang, ada sekitar 8 kecamatan dengan indeks konflik 1, dan 11 kecamatan lainnya dengan indeks konflik antara 1.1. sampai 2.

Tabel 1  
Indeks Konflik Berbasis Kabupaten Di Propinsi DIY

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Konflik
1	Kota Jogjakarta	1.4
2	Bantul	1.270
3	Kulon Progo	1.266
4	Gunung Kidul	1.261
5	Sleman	1.235

Sumber: Data Primer

Dari table tersebut tercermin bahwa Kota Jogjakarta menempati skor indeks konflik tertinggi, yang kemudian diikuti Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Sedangkan dalam level

kecamatan, indeks konflik organisasi keagamaan berbasis Islam 5 besar tertinggi berada di kecamatan Ngampilan, (Yogyakarta), kecamatan Kasihan (Bantul), kecamatan Paliyan (Gunung Kidul), kecamatan Gondokusuman (Yogyakarta) dan Tepus (Gunung Kidul). Temuan ini cukup menarik di mana konflik tertinggi justru berada di kota Jogjakarta yang selama ini kuat dengan kredo sebagai kota budaya, pendidikan dan toleransi.

Tabel 2  
5 Besar Tertinggi  
Indeks Konflik Organisasi Keagamaan Berbasis Islam Pada Seluruh Kecamatan di DIY

No	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Indeks
1	Ngampilan	Jogjakarta	2.5
2	Kasihan	Bantul	2.1
3	Paliyan	Gunung Kidul	2
4	Gondokusuman	Jogjakarta	2
5	Tepus	Gunung Kidul	1.9

Sumber: Data Primer

Dari hasil survai juga menemukan sejumlah factor structural, akselerator dan pemicu konflik organisasi social keagamaan berbasis Islam di propinsi DIY. Untuk penyebab structural, terdapat temuan menarik bahwa konflik organisasi keagamaan berbasis Islam yang berada di daerah urban cenderung lebih banyak disebabkan oleh kompetisi dan dukung mendukung dalam urusan politik. Sangat berbeda dengan konflik organisasi keagamaan di semua kabupaten di DIY, yang lebih didominasi oleh problem tafsir, fihiyyah atau khilafiah dalam mempraktikan peribadahan.

Tabel 3  
Penyebab Struktural Konflik Organisasi Keagamaan Islam di DIY

Penyebab Struktural Konflik Organisasi Keagamaan Islam	Persentase				
	Gunung Kidul	Kulon Progo	Jogja	Bantul	Sleman
Khilafiah dalam peribadahan	61	54	29	78	59
Akses kepemilikan asset tanah atau bangunan	6	0	0	0	12
Akses Kecemburuan terhadap akses social, ekonomi, pendidikan	0	8	0	0	0
Kompetisi dan dukung mendukung dalam urusan politik	4	38	71	22	29

Sumber: Data Primer

Sedang dari sisi pemicu terjadinya konflik, terdapat kecenderungan besar terjadi di level permasalahan individu, dan kemudian bergerak ke arah

kelompok, seperti yang terjadi di Gunung Kidul, Jogjakarta, dan Kulon Progo. Artinya ada kecenderungan konflik disebabkan oleh gesekan kepentingan yang bersifat bottom up. Bukan disebabkan oleh mobilisasi dari tingkat organisasi. Namun berbeda dengan di Bantul dan Sleman, di mana justru pemicu konflik terjadi di level kelompok.

organisasi lain					
-----------------	--	--	--	--	--

Sumber: Data Primer

Terkait dengan eskalasi konflik, survey menemukan sejumlah factor yang menarik di mana di semua kabupaten dan kota di Propinsi DIY menyatakan bahwa adanya provokasi menjadi factor yang paling utama. Yang kemudian disusul oleh factor adanya kabar burung dari mulut ke mulut, terutama di daerah non perkotaan, sedangkan di daerah perkotaan seperti Jogjakarta, factor kabar burung melalui media social berkontribusi cukup besar bagi terjadinya perluasan konflik.

Tabel 4  
Level Pemicu Konflik

Level Pemicu Konflik	Persentase				
	Gunung Kidul	Kulon Progo	Jogja	Bantul	Sleman
Masalah di level organisasi	5	0	14	0	0
Masalah di level pemimpin organisasi	0	0	0	0	0
Masalah di level kelompok	39	8	36	67	59
Masalah di level individual	56	92	50	33	41

Sumber: Data Primer

Sedangkan aktivitas yang pemicu terjadinya konflik antar organisasi keagamaan berbasis Islam, sebagian besar karena alasan mencari-cari kesalahan fihak lain, baik dalam aktivitas social keagamaan, dan kecurigaan terhadap aktivitas organisasi lain di dalam wilayah pengaruh suatu organisasi. Untuk kasus di Bantul, dan Jogjakarta, factor yang cukup besar memberikan picu bagi timbulnya konflik disebabkan oleh aktivitas ejek mengejek dalam aktivitas keagamaan yang pada akhirnya menimbulkan ketersinggungan.

Tabel 5  
Faktor Pemicu Konflik

Faktor Pemicu	Persentase				
	Gunung Kidul	Kulon Progo	Jogja	Bantul	Sleman
Mengintimidasi aktivitas keagamaan organisasi lain	0	0	0	0	0
Ejek mengejek aktivitas keagamaan organisasi lain	28	15	36	45	18
Kecurigaan terhadap aktivitas organisasi lain	17	23	14	22	29
Mencari-cari kesalahan terhadap aktivitas keagamaan	55	62	50	33	53

Tabel 6  
Faktor Yang Mengakselerator konflik

Faktor Yang Mengakselerator konflik	Persentase				
	Gunung Kidul	Kulon Progo	Jogja	Bantul	Sleman
Adanya fasilitasi dari fihak luar organisasi untuk menciptakan konflik	11	0	7	11	12
Adanya provokasi	44	54	50	67	68
Adanya kabar burung atau rumors melalui media social	17	23	29	11	6
Adanya kabar burung atau rumors melalui non media social	28	23	14	11	17

Sumber: Data Primer

Bercermin dari peta indeks konflik di atas, proses pengelolaan konflik social keagamaan perlu dikelola dengan sungguh-sungguh, agar gejala konflik antar organisasi keagamaan Islam yang lahir dalam era demokratisasi tidak bereskalasi menjadi konflik yang destruktif. Dari 78 kecamatan yang ada di DIY, terdapat 4 kecamatan yang sudah mencapai derajat konflik yang agak tinggi, yang mencapai indeks 2 ke atas. Yang lebih krusial lagi bahwa konflik keagamaan berada di wilayah yang berbasis urban (kota Jogjakarta) sampai ke wilayah yang berbasis pedesaan (rural) di Gunung Kidul.

Dalam wawancara dengan sejumlah tokoh keagamaan, yang memiliki otoritas di tingkat pimpinan wilayah (propinsi), seperti Muhammadiyah, NU, Hizbut Tahrir, Tarbiyah menunjukan kedewasaan yang tinggi bahwa konflik dalam Islam memang sebagai keniscayaan dalam memahami wahyu dan realitas social, namun tidak harus berujung dengan pilihan untuk kafir-mengkafirkan satu sama lain. Bahkan kelompok keagamaan seperti LDII, yang selama ini terstigma sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan kepada fihak lain memberikan pembuktian bahwa kelompok di luar LDIIpun harus dihormati, dan membantah opini public bahwa LDII melakukan aktivitas takfiryah. Demikian juga kelompok Ahmadiyah, yang selama ini juga terstigma sebagai kelompok yang sudah keluar dari Islam terkait dengan keberadaan fugur Mirza Ghulam Ahmad dan kitab

Tadzkirah, dalam struktur keyakinan Ahmadiyah. Ahmadiyah memandang bahwa kompetisi dengan fihak lain tidaklah harus dimaknai sebagai kompetisi untuk saling kafir mengkafirkan.

Terdapat sebuah asumsi yang relatif sama dari kalangan organisasi Islam yang relative minoritas seperti LDII, Ahmadiyah, dan Salafi bahwa keterlibatan organisasi keagamaan Islam dalam politik praktis, akan melahirkan sejumlah kemungkinan terjadinya friksi, baik dalam dalam lapangan social, ekonomi dan budaya dengan kelompok lain. Bahkan kelompok organisasi ini tidak bersedia memberikan pengalaman berinteraksi dengan organisasi lain, terutama terkait dengan issue konflik. Sangat berbeda dengan organisasi keagamaan Islam yang memiliki basis massa yang relative besar, seperti Tarbiyah dan Hizbut Tahrir, keterlibatan dalam aktivitas politik, bahkan menjadi partai politik sebagai bagian dari upaya penyebaran Islam secara komprehensif. Kalaupun terjadi konflik atas aktivitas tersebut, lebih disebabkan oleh mis-komunikasi, dan problem individual bukan problem organisasional. Namun sangat berbeda dengan organisasi Islam dengan basis massa yang besar seperti Muhammadiyah dan NU, yang secara terang-terangan menyatakan bahwa tidak bersedia terkait langsung dengan aktivitas politik praktis sebagaimana halnya partai politik, namun terlibat dalam perkara politik untuk mendapatkan kemaslahatan bersama.

Terkait dengan relasi social kawan dan lawan, hampir semua organisasi tidak bersedia memberikan peta simulasi pengalaman keorganisasian. Hanya satu informan dari kelompok Tarbiyah (PKS) bersedia memberikan peta simulasi hubungan social antar organisasi. Itupun dengan syarat untuk tidak dipublikasikan. Meskipun sudah dikonfirmasi dengan adanya sejumlah fakta di lapangan dan forensic di media internet, bahwa terjadinya sejumlah friksi antar organisasi, dari demonstrasi, pendudukan terhadap aktivitas pengajian.

Terhadap ide pelembagaan pengelolaan konflik, para tokoh organisasi keagamaan Islam memiliki pandangan yang sama akan arti pentingnya prinsip ukhuwah Islamiyyah antar organisasi Islam, hormat menghormati satu sama lain, tidak saling mencampuri. Sebagaimana tesis yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun perdamaian di Madinah melalui pembentukan aturan main bersama, yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah.<sup>10</sup>

Studi yang cukup menarik dalam upaya membangun perdamaian secara stabil adalah studi yang dilakukan oleh Charles A. Kupchan. Kupchan membangun tesisnya dengan konsepsi bagaimana mengubah musuh menjadi teman. Selama ini ada kecenderungan besar, bahwa kompetisi dan kemakmuran akan tercapai jika actor politik dan sosial mengkreasi musuh, bahkan jika tidak ada musuh maka musuh tersebut harus diciptakan.<sup>11</sup> Dalam pandangan Kupchan,

tesis mempertahankan diri dengan menciptakan musuh justru kontraproduktif dalam struktur sosial sekarang ini. Energi anarkhisme dalam era globalisasi semakin menguat dibandingkan dengan era sebelumnya, sehingga tesis yang produktif untuk membangun kemakmuran dan kekompakitan adalah dengan cara menciptakan system sosial yang lebih adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab (*social governance*).

Konsepsi tentang *social governance*, dalam studi yang dilakukan oleh Surwandono sesungguhnya telah dilakukan oleh Muhammad SAW di era Makkah. Muhammad SAW memandang bahwa konflik permanen antara Muslim, Yahudi, dan Nasrani harus diselesaikan dengan baik. Jika tiga agama besar, Islam, Yahudi, dan Nasrani sebagai representasi agama samawi saling melakukan konflik secara konfrontatif, dan menihilkan satu sama, justru akan merusak struktur kemanusiaan yang diperjuangkan oleh agama samawi itu sendiri. Tehnologi yang diperkenalkan oleh Muhammad SAW dalam membangun *social governance* adalah dengan membangun tertib sosial masyarakat Madinah dalam konsepsi perdamaian abadi. Pembuatan system sosial yang adil, transparan, jujur, bertanggung jawab akan memungkinkan interaksi antar kelompok dalam masyarakat justru didominasi oleh iklim kerjasama dibandingkan dengan permusuhan satu sama lain.<sup>12</sup> Terkait dengan ide pelembagaan konflik, sebagian besar organisasi Islam menyatakan bahwa gagasan yang paling penting adalah bagaimana membangun paradigm organisasi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

#### IV. KESIMPULAN

Pengelolaan konflik keagamaan Islam membutuhkan kombinasi antara kekuatan supra-struktur dalam bentuk gagasan terbuka, yang memungkinkan keberadaan fiqh keagamaan yang dipakai oleh organisasi keagamaan, seperti Ba'tsul Masail di NU maupun Himpunan Putusan Tarjih di Muhammadiyah bukan sebagai referensi tunggal dan absolut untuk menilai eksistensi kelompok lain, baik dalam terminology pandangan sebagai kawan ataupun sebagai competitor. Hal ini penting, agar tidak terjadi akselerasi perubahan makna dari competitor menjadi musuh, dan musuh dipersepsi sebagai setan. Dan juga ketersediaan infrastruktur, seperti system informasi konflik, diskusi lintas organisasi keagamaan secara inklusif. Ketersediaan system informasi konflik akan memungkinkan masing fihak akan memiliki kesadaran bersama, bahwa eskalasi konflik yang terjadi dapat segera dikelola dengan baik sehingga konflik yang terjadi dalam organisasi keagamaan berbasis Islam tidak menghasilkan dampak buruk dan berkeagamaan dan berkebangsaan.

<sup>10</sup> Surwandono, Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*, Yogyakarta, Ghalia Ilmu, 2011

<sup>11</sup> Charles A. Kupchan, *How Enemies Become Friends: The Sources Of Stable Peace*, Princenton And Oxford, Princeton University Press, 2010

<sup>12</sup> Op.cit

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, Syafu'l, *Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1997
- [2] Kupchan, Charles A. , *How Enemies Become Friends: The Sources Of Stable Peace*, Princenton And Oxford, Princeton University Press, 2010
- [3] Muhsin, Hussein bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- [4] Munir, Abdul Mul Khan, *Pemikiran Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta, Bina Aksara, 2000
- [5] Nur Hasan, Nur, *Ijtihad Politik NU: Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU Dalam Upaya Pemberdayaan "Civil Society"*, Yogyakarta, Manhaj, 2009
- [6] Qardhawiy, Yusuf, *Fiqhul Ikhtilaf* (Terjemahan), Jakarta, Gema Insani Press, 2005
- [7] Yusuf Qardhawiy, *Berpolitik Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- [8] Ramadhan, Muhammad al Buty, *Sirah Nabawiyah* Jilid I, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- [9] Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta, LPPI UMY, 2006
- [10] Surwandono, Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*, Yogyakarta, Ghalia Ilmu, 2011
- [10] Zahrah, Abu Muhammad, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta, LOGOS, 2006